

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Memahami konflik di era pasca-Perang Dingin membutuhkan seperangkat alat baru untuk menavigasi dunia ketidakamanan manusia. Human Security kemudian hadir sebagai salah satu perangkat analisis baru, yang mampu menjelaskan terkait masalah keamanan baru seperti keamanan manusia. Masalah keamanan manusia muncul sebagai dampak dari beberapa faktor, salah satunya adalah krisis kemanusiaan. Di Sudan Selatan, krisis kemanusiaan yang berada pada level ekstrem telah berlangsung sejak lama dan telah memicu respon internasional. Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor utama terjadinya krisis kemanusiaan di Sudan Selatan, diantaranya meliputi perebutan kekuasaan, korupsi dan impunitas, kapasitas kelembagaan dan tatanan pemerintah yang lemah, politik identitas, militerisasi, hingga kurangnya partisipasi inklusif aparatur negara.

Kondisi ini kemudian memperburuk perang sipil yang sudah terjadi sejak beberapa dekade yang lalu. Selama perang sipil ini berlangsung, telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran – pelanggaran HAM yang terjadi secara masif. Krisis kemanusiaan merupakan suatu masalah yang seharusnya tidak perlu lagi terjadi dalam era kontemporer saat ini, ketika masyarakat sudah semakin maju. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Sudan Selatan merupakan salah satu bentuk kemunduran, dalam masyarakat internasional secara khusus dalam nilai – nilai kemanusiaan yang universal. Dalam konflik ini, hak keamanan manusia atau *human security* warga Sudan Selatan tidak pernah terpenuhi bahkan justru dilanggar.

Dimulai dari hak untuk merasa bebas dari ketakutan hingga hak untuk merasa bebas dalam mendapatkan perlindungan dari kekerasan akibat konflik, hingga perlindungan dari ancaman – ancaman yang menyebabkan krisis.

Ancaman – ancaman setiap hari justru selalu ada, yang datang dari para pemberontak bahkan dari pemerintah. Dalam krisis ini, aspek human security masyarakat sipil di Sudan Selatan tidak terpenuhi oleh negaranya. *Personal security*, masyarakat Sudan Selatan tidak terpenuhi selama konflik berlangsung. Hal ini karena terdapat ancaman fisik, tindakan teror, kekerasan domestik, hingga child labour yang diterima masyarakat sipil di Sudan Selatan. *Community security* juga tidak terpenuhi melalui ancaman genosida terhadap etnis – etnis di negara tersebut. Kemudian, *political security*, yang mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia juga sudah dilanggar secara masif sejak awal konflik bermula melalui pembunuhan, kekerasan berbasis gender, eksploitasi, pelecehan seksual, hingga genosida.

Selanjutnya *economic security* yang merupakan pembebasan dari kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan hidup tentu saja tidak terpenuhi sama sekali. Hal ini ditunjukkan dengan data kemiskinan yang semakin meningkat, bencana kelaparan yang masif, hingga kehilangan tempat tinggal. Kemudian *food security* yang tidak terpenuhi, dimana masalah kerawanan pangan tersebar hampir ke seluruh Sudan Selatan pada level yang ekstrem. *Health security* yang tidak dijamin negara dan hanya mengharapkan bantuan eksternal. Namun hal tersebut juga tidak terpenuhi secara efektif, mengingat banyak warga sipil yang meninggal akibat penyakit yang timbul selama perang berlangsung. Hal ini

didukung dengan kondisi negara yang mengalami perang, sehingga masyarakat mendapat kesulitan dalam mengakses air bersih, hingga kondisi sanitasi yang buruk.

Kemudian yang terakhir adalah *environmental security*, dimana negara perlu menjamin keamanan warga negaranya dari masalah lingkungan, termasuk bencana alam. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Sudan Selatan sejak awal tidak pernah memprioritaskan masyarakatnya. Negara seharusnya bertugas memberikan perlindungan dan memberi jaminan keamanan terhadap warganya, bukan sebaliknya. Krisis kemanusiaan ini akan terus berlangsung selama perang sipil itu sendiri terus terjadi. Dan perang sipil ini akan terus terjadi jika pemerintah Sudan Selatan tidak ingin berbenah dan mulai mementingkan masyarakatnya. *Human security* merupakan instrumen yang penting untuk menjamin keamanan masyarakat, dan sudah pada hakikatnya harus dipenuhi oleh negara.

Sebagai bagian dari komunitas internasional, PBB melalui OCHA dengan mandat yang diadopsi dari resolusi Majelis Umum 48/182 tentang penguatan koordiansi bantuan darurat kemanusiaan PBB, melaksanakan tanggung jawabnya sebagai aktor, yaitu organisasi internasional serta berdasarkan kesepakatan *Responsibility to Protect* dengan melakukan upaya respon terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Sudan Selatan. Upaya yang dilakukan oleh OCHA dalam menanggapi krisis kemanusiaan di Sudan Selatan, meliputi pembuatan agenda kebijakan, melakukan koordinasi, menyediakan informasi, melakukan advokasi, dan mengalokasikan bantuan dana kemanusiaan.

Dengan dasar prinsip-prinsip kemanusiaan, setiap agenda kebijakan yang

dibuat oleh OCHA tidak terlepas dari kepentingan tanggapan terhadap kondisi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Penyediaan informasi berupa laporan terkait kondisi krisis dilapangan yang dilanjutkan dengan proses advokasi yang dilakukan oleh OCHA, bertujuan untuk menarik simpati dari negara-negara, organisasi-organisasi kemanusiaan, atau individu-individu untuk turut serta membantu dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Sudan Selatan. Selain itu, kegiatan koordinasi dan alokasi bantuan dana kemanusiaan memungkinkan OCHA mengumpulkan dana tanggapan darurat dengan bantuan organisasi yang relevan; dan dipergunakan untuk strategi respon yang terkoordinasi.

Dalam tanggapan responnya, OCHA dibantu oleh cluster-cluster yang berbeda untuk operasi kemanusiaan sehari-hari. Masing-masing cluster yang masih dalam lingkup bidang yang sama akan berkerjasama dengan otoritas lokal dan LSM yang relevan dengan bidangnya. Tindakan OCHA dapat juga dinilai sebagai bentuk intervensi kemanusiaan atas dasar kegagalan pemerintah Sudan Selatan menjamin hak asasi manusia warga Sudan Selatan, secara khusus yang terdampak krisis.

Meski begitu, pelaksanaan agenda respon kemanusiaan tidak berjalan tanpa hambatan. Di lapangan banyak terjadi insiden-insiden yang menghambat bantuan kemanusiaan menjangkau kelompok yang membutuhkan. Hambatan tersebut meliputi lingkungan fisik yang sangat menantang, kekerasan terhadap pekerja bantuan dan perampasan aset, serta serangkaian hambatan birokrasi. Untuk menghilangkan hambatan yang ada, OCHA dan mitra kemanusiaan melakukan negosiasi rutin dan menjalin kerjasama dengan otoritas lokal di Sudan Selatan.

Cara lain yang bisa dilakukan oleh OCHA adalah dengan sebisa mungkin mencari celah – celah jalur akses lain untuk menyuplai bantuan kemanusiaan kepada kelompok yang membutuhkan di lokasi-lokasi yang dikuasai pemberontak.

## 6.2 Saran

Adapun saran – saran yang dapat diberikan penulis dengan melihat kondisi krisis kemanusiaan di Sudan Selatan adalah:

1. PBB sebagai organisasi yang memiliki kapabilitas untuk mengintervensi konflik di Sudan Selatan perlu memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pemerintah Sudan Selatan, dengan tujuan agar pemerintah Sudan Selatan mampu menyelesaikan konflik dan mengatasi masalah krisis kemanusiaan ekstrem yang berkepanjangan ini.
2. Masalah krisis kemanusiaan ini akan dapat diatasi jika akar masalahnya dapat diatasi. Oleh karena itu pemerintah Sudan Selatan perlu melakukan reformasi dan menyelesaikan akar masalah yang menjadi penyebab krisis, dengan bekerja sama lebih kooperatif dengan organisasi – organisasi kemanusiaan baik lokal maupun internasional.